

Press Release

Kebakaran Lahan Gambut Meledak di Awal 2026

Jakarta, 9 Februari 2026

Awal tahun 2026 yang seharusnya dalam periode musim hujan, justru terjadi ledakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama pada ekosistem gambut di berbagai wilayah Indonesia. Pantau Gambut mencatat 5.490 titik panas terdeteksi sepanjang Januari 2026 di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Lebih dari setengah keseluruhan temuan titik api berada pada ekosistem gambut lindung dengan 3.266 titik.

Sebaran Titik Panas di area KHG (Januari 2026)



Ekosistem lindung seharusnya dijaga dan hanya diperuntukan untuk kegiatan penelitian dan konservasi. Kebakaran pada gambut dalam ini berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis permanen yang berdampak pada penurunan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat terdampak asap kebakaran. Temuan ini menunjukkan bahwa kebakaran gambut tidak lagi bersifat musiman, tapi telah menjadi krisis struktural yang terjadi setiap tahun.

Juru Kampanye Pantau Gambut, Putra Saptian menegaskan, "Rangkaian bencana ekologis akibat rusaknya ekosistem gambut harus dibaca sebagai satu kesatuan peringatan ekologis yang serius. Pemulihan ekosistem gambut tidak boleh lagi diperlakukan sebagai agenda formalitas atau ditunda atas nama kepentingan ekonomi jangka pendek."

Aceh dan Kalimantan Barat menjadi provinsi terdampak paling parah, dengan masing-masing 1.444 dan 2.216 titik panas. Kami menemukan 1.824 titik panas berada di dalam area konsesi pada skala nasional, dengan 1.617 titik berada pada izin HGU perkebunan sawit, terutama di Kalimantan Barat. Temuan ini menguatkan fakta bahwa pengeringan gambut melalui kanalisasi dan alih fungsi lahan untuk perkebunan monokultur masih menjadi penyebab utama kebakaran berulang.

Pantau Gambut juga menyoroti tingginya karhutla di Pulau Papua, khususnya Papua Selatan yang menyumbang 308 titik dari 589 titik panas. Mengingat saat ini wilayah tersebut menjadi salah satu fokus Program Strategis Nasional (PSN) untuk pengembangan pangan, lonjakan kebakaran di Papua Selatan menjadi alarm keras. Tanpa rencana perlindungan gambut yang matang, proyek skala besar ini berisiko mempercepat degradasi ekosistem gambut yang selama ini relatif terjaga.

Kondisi di atas diperparah oleh mandeknya restorasi gambut dan lemahnya sistem pemantauan negara terhadap perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia. Pasca berakhirnya tugas Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) pada 2024 silam, belum ada lagi lembaga yang secara khusus melakukan restorasi gambut. Terlebih lagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dipisahkan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.

Pemisahan kedua kementerian tersebut, serta tidak adanya kepastian mengenai instansi yang menjadi *focal point* pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut, menciptakan kegamangan terhadap nasib ekosistem gambut di masa mendatang. Hal ini berimplikasi terhadap fragmentasi koordinasi Kementerian/Lembaga yang menjadi semakin sektoral. Padahal, banyak ekosistem gambut yang berada di dalam kawasan hutan, sehingga konteks penegakan hukum multisektor menjadi aspek krusial yang penting diperhatikan.

Meskipun pada Agustus 2025 lalu, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) telah membentuk Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove (BPEGM), hingga hari ini belum terdapat kejelasan mengenai rencana pelaksanaan dan pemeliharaan infrastruktur restorasi beserta operasionalisasi barang milik negara (BMN) tak benda seperti Pranata Informasi Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove (PRIMS) dan Sistem Pemantauan Air Lahan Gambut (SIPALAGA) yang sebelumnya berjangkar di BRGM.

Meski kewenangan transfer BMN tak benda otomatis beralih ke KLH (Deputi Bidang Tata Lingkungan dan SDA Berkelanjutan), sistem pemantauan BRGM belum aktif secara optimal hingga awal 2026. Absennya pengawasan *real-time* dan lemahnya restorasi gambut menandakan kemunduran perlindungan ekosistem dari karhutla. Pantau Gambut memperingatkan risiko ini sangat berbahaya mengingat potensi El Nino pada 2027.

Putra menambahkan, "Arah kebijakan ke depan harus mampu menyatukan kembali pengelolaan gambut secara lintas sektor dengan orientasi utama pada pemulihan lingkungan hidup, pencegahan bencana, dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat."

Kontak Media

Jika Anda membutuhkan panduan maupun konsultasi terkait dengan publikasi ini, Anda dapat menghubungi:

- **Putra Saptian (Campaigner Pantau Gambut)**
putra.saprian@pantaugambut.id
- **Yoga Aprilliano (Communications Lead Pantau Gambut)**
yoga.aprilliano@pantaugambut.id

Kenapa Gambut Penting

Indonesia memiliki luasan gambut tropis terbesar di dunia dengan luas mencapai 13,43 juta hektare yang tersebar di tiga pulau besar yaitu Sumatera, Kalimantan dan Papua. Lahan gambut di Indonesia menyimpan sekitar 57 gigaton karbon atau 20 kali lipat karbon tanah mineral biasa. Cadangan karbon yang tersimpan di dalam tanah gambut akan terlepas ke udara jika lahan gambut dikeringkan atau dialihfungsikan. Padahal, gambut menyimpan sekitar 30% karbon dunia. Gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer akan menahan panas dari matahari sehingga meningkatkan suhu bumi. Proses yang dikenal sebagai efek rumah kaca ini dapat mempercepat laju perubahan iklim. Oleh sebab itu, melindungi dan mencegah kerusakan lahan gambut menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan perubahan iklim. Untuk mengetahui informasi tentang gambut lainnya, Anda bisa mengakses tautan pantaugambut.id/pelajari.

Tentang Pantau Gambut

Pantau Gambut adalah organisasi non pemerintah yang berjejaring di sembilan provinsi, yang berfokus pada riset serta advokasi dan kampanye untuk perlindungan dan keberlanjutan lahan gambut di Indonesia. Kami juga menyoroti komitmen restorasi gambut oleh pemerintah, organisasi independen, serta pelaku usaha. Pantau Gambut berupaya menyambung pandang mata publik untuk ikut mengamati masalah lingkungan terkait lahan basah ini melalui kanal-kanal komunikasi dan kampanye.